



# REVIU IKUKE-3

INDIKATOR KINERJA UTAMA KE-3

REVIU IKUKE-3  
INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

KE-3

PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

Jl. SANTAWI No. 94A TELP. (0332) 421862 / FAX. (0332) 420457  
WWW.PENGADILANAGAMA.BONDOWOSO.PID.go.id  
BONDOWOSO 68216





## **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO**

**Nomor : W13-A18/2410/OT.00/SK/XI/2017**

### **TENTANG : REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2017**

#### **KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014;
  2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Revisi Rencana Strategis Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2015-2019 sehingga dapat tercapai sasaran mutu yang diinginkan perlu ditetapkan indikator kinerja;
  3. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bondowoso;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
  2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
  4. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
  7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
  8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
  9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
  10. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014.

12 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 Tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

13 Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 Tanggal 24 Oktober 2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Tanggal 29 Nopember 2017 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Review Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2015 – 2019.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2017.**

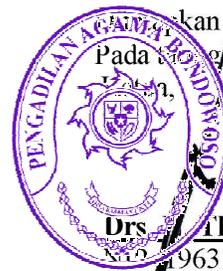
**Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : W13-A18/0043/OT.00/SK/I/2017 Tanggal 03 Januari 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2017;

**Kedua** : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : W13-A18/2410/OT.00/SK/XI/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2017;

**Ketiga** : Review Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019.

**Keempat** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

**Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



di Bondowoso  
Pada tanggal : 30 Nopember 2017

**Drs. Thabrani, S.H., M.H.**  
No. 19631231.199403.1.022

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :  
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

**PENETAPAN HASIL REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu yang diputus tahun berjalan	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase penyelesaian perkara masuk yang diputus pada tahun berjalan	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase penurunan sisa perkara	Prosentase perkara yang diputus kurang dari 5 (lima) bulan dengan perkara yang diputus lebih dari 5 (lima) bulan	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan perkara yang diputus	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Prosentase antara jumlah pemohon informasi yang dilayani (puas terhadap layanan) dengan jumlah pemohon informasi	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	Prosentase isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Prosentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	Prosentase kelengkapan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK dengan perkara yang dimohonkan upaya hukum	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	Prosentase amar putusan perkara ekonomi syaria'ah yang diupload dalam website dengan jumlah putusan perkara	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpunggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Prosentase jumlah pemohon prodeo dengan jumlah pemohon prodeo yang dilayani	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Prosentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	Prosentase penyelesaian perkara Voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Prosentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dengan jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
4	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Prosentase Putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah Putusan perkara yang sudah BHT	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.